

Pengaruh Nasionalisme dan Perkembangan Kapabilitas Power Cina Pada Sikap Agresif Terhadap Jepang Pasca Nasionalisasi Jepang atas Senkaku/Diaoyu Tahun 2012

Yudo Satryo Prabowo – 070710177

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Japan nationalisation over the Senkaku islands / Diaoyu that occurred on 11 September 2012 has given rise to new tensions between China and Japan. Given the sensitivity expressed by Beijing on these islands, Japan decided to maintain the status quo purchase of the islands are uninhabited. However, the government and the people of China turns showed strong reactions that tend to be aggressive against the measures taken by Japan's. Strong reactions that tend to be aggressive indicated China is influenced by several factors, including nationalism and power capabilities. This paper would like to find out and explain how nationalism and China's power capability, influence the China changes against the Japanese archipelago nationalization. In this paper, the technique of analysis using qualitative methods, namely a more in-depth analysis is done by looking at the data and facts, then the data and facts correlated with the basic theory and concepts.

Keywords: *Senkaku / Diaoyu, Aggressive Behaviour Nationalism, Power Capability*

Nasionalisasi Jepang atas pulau-pulau Senkaku / Diaoyu yang terjadi pada 11 September 2012 telah melahirkan ketegangan baru antara China dan Jepang. Beijing menyatakan bahwa terdapat sensitivitas tersendiri terkait hal ini. Jepang kemudian memutuskan untuk mempertahankan status quo dari pulau-pulau tidak berpenghuni. Namun, pemerintah dan rakyat China ternyata menunjukkan reaksi kuat yang cenderung agresif terhadap kebijakan yang diambil oleh Jepang. Reaksi keras yang ditunjukkan China dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk nasionalisme dan kapabilitas kekuatannya. Tulisan ini ingin mengetahui dan menjelaskan bagaimana nasionalisme dan kapabilitas kekuatan Cina, pengaruh Cina terhadap perubahan kepulauan nasionalisasi Jepang. Dalam tulisan ini, teknik analisis menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang lebih mendalam dilakukan dengan melihat data dan fakta, maka data dan fakta berkorelasi dengan teori dan konsep dasar.

Kata-kata kunci: *Senkaku / Diaoyu, Perilaku Agresif, Nasionalisme, Power*

Pasca nasionalisasi Jepang atas kepulauan sengketa Senkaku/Diaoyu tahun 2012, Cina beberapa kali menunjukkan sikap yang lebih agresif. Pada saat Jepang mengumumkan pembelian kepulauan Senkaku/Diaoyu, kantor berita Cina Xinhua melaporkan bahwa dua kapal pengintai Cina telah tiba di kawasan itu untuk "menegaskan kedaulatan negara". Cina juga melancarkan serangan verbal terhadap Jepang. Kementerian Luar Negeri Cina memperingatkan Tokyo harus "menanggung semua konsekuensi serius". Dikatakan bahwa "pemerintah Cina tidak akan duduk diam menonton kedaulatan teritorialnya dilanggar" (Philips, www.telegraph.co.uk 2012). Sejak itu, kapal pemerintah Cina pada beberapa kesempatan telah berlayar masuk dan keluar dari wilayah sengketa. Kemudian pada Desember 2012 Jepang juga menyatakan bahwa sebuah pesawat pemerintah Cina telah melanggar wilayah udara kepulauan (Anonim, <http://www.bbc.co.uk> 2013). Nasionalisasi yang dilakukan Jepang juga menimbulkan gelombang gerakan anti-Jepang di kota-kota Cina. Pada 15 september 2012, terjadi protes anti-Jepang yang berujung tindak kekerasan dan pengrusakan. Atas insiden yang terjadi, pemerintah Jepang menuding pemerintah Cina kurang tanggap dan cenderung membiarkan aksi pengrusakan terjadi (anonim, www.scmp.com 2013).

Mengenai bagaimana status kepulauan, posisi Jepang atas kepulauan Senkaku/Diaoyu di jelaskan dalam pernyataan resmi oleh Departemen Luar Negeri Jepang pada tanggal 8 Maret 1972 dengan judul *The Basic View of the Ministry of Foreign Affairs on the Senkaku Island*. Berdasarkan pernyataan tersebut, Jepang mengklaim bahwa kepulauan Senkaku merupakan pulau *terra nullius* (atau tanah tanpa pemilik) pada saat kepulauan itu secara formal dimasukan dalam teritori Jepang pada 1895 (Shaw, 1999:22).

Setelah Perang Dunia II Jepang menarik klaim atas beberapa teritorial dan kepulauan termasuk Taiwan dibawah Perjanjian Perdamaian San Fransisco tahun 1951. Namun dibawah perjanjian yang sama, pada tahun 1971, kepulauan Nansei Shoto yang berada dibawah perwalian militer AS dikembalikan pada pemerintahan Jepang. Jepang mengatakan bahwa Cina tidak berkeberatan atas kesepakatan San Fransisco dan baru sejak tahun 1970an pemerintah Cina dan Taiwan mulai menekan klaim mereka setelah muncul isu sumber minyak (anonim www.bbc.co.uk). Dasar protes dari pihak Cina mengklaim kepulauan Diaoyu sebagai miliknya adalah dengan bukti Deklarasi Kairo dan Potsdam berisi penantatanganan menyerah bersyarat Jepang 1945 (Lee dan Ming, 2012). Cina kemudian lebih jauh menguatkan klaimnya menggunakan dasar geografi sebagai justifikasi kedaulatan. Dibawah *United Nation Convention on the Law of the Seas* (UNCLOS), Cina

menggunakan aturan ini untuk menguatkan klaimnya, namun secara geografi jarak antara Cina dan Jepang tidak sampai mencapai 400 mil laut sehingga batas-batas mereka menjadi tumpang tindih.

Reaksi Cina bisa dilihat dari beberapa aspek yang mendorong. Tren terbaru melihat masalah maritim berkaitan dengan masalah keamanan internasional sebagai area konflik yang di sebabkan persaingan yang ketat atas sumber daya alam (Yee 2011: 166). Apa yang berbeda salah satunya adalah pengaruh nasionalisme di Jepang dan Cina. Dari sikap Cina dan Jepang terkait klaim teritorial ini, keduanya secara tidak langsung menunjukkan rasa persaingan, kekhawatiran strategis dan prospek masa depan. Perasaan dan sikap orang Jepang terhadap Cina mulai berubah sejak seputaran 2010 ketika mereka menyadari bahwa Cina telah melampaui Jepang sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia (Kalha 2012). Status ekonomi dan perkembangan kekuatan militer atau kapabilitas power juga memberi pengaruh. Contohnya ketika Jepang menangkap sebuah kapal nelayan Cina di dekat kepulauan Senkaku/Diaoyu, namun terpaksa mundur dan melepaskan mereka ketika Cina mengancam untuk memotong ekspor bahan mineral penting dalam pembuatan barang hi-tech (Kalha 2012). Dari sisi militer, dapat dilihat dari pertimbangann yang seperti *Defence White Paper* sebutkan, modernisasi militer Cina akan semakin ditandai dengan pengembangan kemampuan proyeksi kekuatan yang signifikan (Department of Defence, Australian Government,).

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan maka rumusan masalah yang dapat di ambil untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : Dengan melihat kasus nasionalisasi Jepang atas kepulauan sengketea Senkaku/Diaoyu yang telah meningkatkan ketegangan Cina-Jepang, apa arti penting kepulauan Diaoyu bagi Cina dan bagaimana nasionalisme serta kapabilitas power yang dimiliki Cina saat ini mempengaruhi sikap Cina hingga cenderung kearah yang lebih agresif ?.

Landasan Teoritik Nasionalisme

Terkait Nasionalisme, Mill dalam tulisannya *Representative Government* memberikan gambaran dalam memandang nasionalisme terutama dalam konsep "*rational nationalism*" harus dipahami sebagai dialektika yang alami. (Mill 1861) Berbeda dengan realis dan liberalis yang didasarkan pada keadaan rasional kepentingan sendiri, konstruktivis menemukan bahwa faktor ideasional, sering digambarkan

sebagai non-materi dan mendikte aksi negara (Wendt 1995). Norma dan identitas adalah apa yang dipresepsikan negara melalui penciptaan subjektif dari politik identitas. Oleh karena itu, identitas menjadi lebih dominan dibandingkan rasionalitas oleh aktor dalam mendefinisikan serta perilaku konsekuen untuk melindungi kepentingannya (Wendt, 1999: 238-243). Norma dan identitas adalah apa yang di presepsikan negara melalui penciptaan subjektif dari politik identitas Dengan begitu gerakan nasionalis yang berlangsung di Cina didasari karena nasionalis Cina percaya bahwa mereka perlu melindungi kepentingan nasional mereka, dan terinspirasi oleh identitas nasional mereka untuk bertindak seperti "patriot".

Dalam tulisannya, Johnston menyatakan bahwa perilaku internasional Cina mendapat pengaruh dari sisi sosial. Dengan demikian, Cina tidak mungkin untuk mengabaikan realitas material dari kebangkitan Cina dan faktor dalam hubungan luar negerinya, menjadi penting untuk mengakui faktor ideasional atau konstruksi sosial yang berdampak terhadap urusan internasional (Johnston 2007).

Teori *Power Transition*

Realis yang melihat negara sebagai aktor utama dan fokus pada pergeseran relasi kekuasaan dalam sistem internasional antara negara-negara. Robert Gilpin menunjukkan bahwa ketika kekuatan negara meningkat, *'a state will seek to change the international system through territorial, political and economic expansion until the marginal costs of further change are equal to or greater than the marginal benefits'* (Gilpin 1981: 106). Berdasarkan premis Gilpin, realis mengklaim bahwa Cina tidak puas dengan struktur internasional yang ada dan hubungan kekuasaan yang dihasilkannya, dan dengan demikian berusaha untuk menantang status quo (Buzan & Segal 1994, Pg: 6, Gernstein & Munro 1997).

Untuk beberapa realis lain, seperti Friedberg (1993), dan Organski Kugler (1980), *great power* yang tidak puas akan cenderung untuk menantang negara dominan dan mungkin bisa menyebabkan konflik dan perang. Cina, sesuai dengan kriteria dan termasuk dalam kategori *great power* ini. Lebih jauh, Merujuk pada tulisan Kugler dan Tamen, untuk melihat bagaimana interaksi antara Cina dan Jepang serta bagaimana negara mengambil sikap berdasarkan kapabilitas power yang dimiliki maka dapat dilihat berdasarkan faktor status quo, konflik dan kooperasi, hirarki. (Kugler, Tamen 2004).

Metodologi Penelitian

Definisi konseptual dan operasional: (1) Nasionalisme dan Bentuk Nasionalisme Cina

Meskipun istilah "nasionalisme" memiliki berbagai makna, nasionalisme secara umum digunakan untuk menggambarkan dua fenomena : (1) sikap anggota suatu bangsa saat mereka peduli tentang identitas mereka sebagai anggota bangsa itu dan (2) tindakan yang diambil para anggota suatu bangsa dalam berusaha untuk mencapai (atau mempertahankan) beberapa bentuk kedaulatan politik (Nielsen 1998-9, 9). Masing-masing aspek memerlukan elaborasi. (1) menimbulkan pertanyaan tentang konsep bangsa atau identitas nasional, tentang apa itu milik bangsa, dan tentang seberapa seseorang harus peduli pada suatu bangsa, sementara dalam hal keanggotaan seorang individu dapat secara sukarela atau tidak. (Smith, 1991). (2) menimbulkan pertanyaan tentang apakah kedaulatan memerlukan akuisisi kenegaraan penuh dengan otoritas penuh untuk urusan domestik dan internasional, atau apakah sesuatu yang kurang dari kenegaraan akan cukup (Gellner 1983, ch. 1).

Variasi nasionalisme Cina mencakup empat generasi yang berbeda. Generasi keempat yang muncul setelah 19770an unik karena muncul pada masa "*relative material prosperity*" yang juga memiliki "*a strong desire to make their mark*" (Gries 2005, pg 4-5)

(2) Kapabilitas Power

Para akademisi seringkali mendefinisikan *power* sebagai sebuah cara, artinya kekuatan dan kapasitas yang membentuk kemampuan untuk mempengaruhi perilaku aktor lain agar bertindak sesuai dengan tujuan aktor yang mempengaruhi tersebut (Griifiths&O'Callaghan, 2002: 253). Menurut Morgenthau, *power* merupakan sebuah hubungan antara dua aktor politik dimana aktor A memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap perilaku dan pikiran aktor B.

Komponen suatu *power* bangsa dalam menghasilkan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku bangsa lain dapat dilihat dari sisi populasi, produktivitas dan kapasitas politik. Kapabilitas merupakan agregasi dari populasi dunia, penduduk perkotaan, pengeluaran militer, personil militer, produksi besi dan baja, dan batu bara dan konsumsi minyak. Teori Transisi Power menggunakan output total ekonomi suatu bangsa

ditimbang dengan kapasitas politiknya. Parameter COW dan GDP sangat berkorelasi (Kugler, Arbetman 1989).

Teknis Penulisan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatif dengan berusaha menjelaskan pengaruh nasionalisme dan kapabilitas power terhadap sikap Cina hingga cenderung kearah yang lebih agresif, dengan fokus reaksi Cina pasca pembelian kepulauan Senkaku/Diaoyu oleh Jepang tahun 2012 dengan melihat faktor yang mendorongnya. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini lebih pada melihat momentum pembelian kepulauan sengketa oleh Jepang pada September 2012

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kajian dokumen. Dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis / gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi (Moleong, 2005).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu analisis mendalam berdasarkan interpretasi dan teori terhadap data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul (Silalahi, 2006).

Pembahasan

Nilai dan Arti Penting yang Dimiliki Kepulauan Diaoyu bagi Cina

Arti penting Kepulauan Diaoyu bagi Cina dapat dilihat dari beberapa aspek, dan dalam pembahasan ini di ambil tiga aspek. Pertama, Potensi kekayaan alam wilayah Kepulauan Diaoyu. Kepemilikan atas kepulauan Diaoyu dapat mempengaruhi 40.000 km² sekitar landas kontinen atau daerah zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan kontrol pulau akan memberi kepemilikan sumber daya alam di sekitarnya. Hal ini tentu tidak hanya tentang industri perikanan, tetapi juga tentang potensi cadangan minyak dan gas di wilayah ini. Pada tahun 1968 Komisi Ekonomi PBB untuk Asia timur memprediksi kemungkinan kekayaan sumber daya minyak bumi dan gas yang melimpah di Laut Cina Timur. Pemerintah Jepang kemudian menegaskan survei Komisi ekonomi PBB atas prediksi kekayaan minyak bumi dengan perhatian khusus pada kepulauan Senkaku (MOFA 2013).

Secara ekonomi, kepulauan Diaoyu sangat menguntungkan untuk Cina. Mengapa demikian adalah karena Cina merupakan konsumen minyak terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat dan menjadi konsumen energi global terbesar pada tahun 2010. Cina memperkirakan potensi cadangan minyak di perairan laut Cina Timur sebanyak 70-160 miliar barel, angka yang jauh lebih tinggi dari perkiraan US Geological Survey dari pertengahan 1990-an. Cina juga memperkirakan laut Cina Timur berisi sekitar 250 triliun kaki-kubik gas alam, berbeda dengan analisis energi AS yang hanya memperkirakan cadangan gas alam sebanyak 1 sampai 2 triliun kaki-kubik (www.eia.gov 2014).

Aspek yang kedua adalah posisi strategis. Karena letak posisi geografis penting sebagai pos garis depan untuk Cina dan pos terakhir dari barisan belakang untuk Jepang, nilai strategis dari Kepulauan Diaoyu di militer dan geopolitik tidak bisa diremehkan. Bagi Cina, Kepulauan Diaoyu terletak tepat di pusat strategi geografis Cina yang disebut sebagai "rantai pulau pertama", yang didefinisikan oleh garis pantai Cina yang membentang dari Kepulauan Kurile, Jepang, Kepulauan Ryukyu, melalui Taiwan, ke Filipina dan Kepulauan Spratly. Rantai pulau memisahkan perairan pesisir Cina dan Samudera Pasifik, posisi ini dipandang sebagai penghalang alami terhadap proyeksi kekuatan Cina diluar garis pantainya. Dari perspektif saingan Cina, beberapa melihat bahwa "rantai pulau pertama" adalah semacam "Great Wall secara terbalik: ... garis yang terorganisasi dengan baik dari sekutu AS yang berfungsi sebagai semacam menara penjaga untuk memantau dan mungkin memblokir akses Cina ke Samudera Pasifik" (Kaplan, 2010). Strategis vital yang penting dari Kepulauan Diaoyu adalah bahwa dengan mengendalikan kelompok pulau, maka akan "memecah" perimeter "rantai pulau pertama" dan memberikan jalur aman ke dalam dan ke luar Samudera Pasifik, sehingga memperluas perimeter pertahanan laut Beijing ke Barat Pacific (Guo, 2012). Akses ke Kepulauan Diaoyu akan sangat berguna untuk kekuatan kapal selam Cina, karena akan memungkinkan kapal selam untuk terjun lebih dalam di perairan timur, maka menjadi lebih sulit bagi Amerika Serikat (AS) dan Jepang untuk melacak rute kapal selam Cina sebelum menyelinap masuk ke Samudera Pasifik (Scarborough, 2006)

Aspek yang ketiga adalah nilai sejarah Kepulauan Diaoyu dan ikatan emosional Cina. Cina memiliki dokumen sejarah yang mana saat pertama kali kepulauan ini ditemukan, menyatakan kelompok pulau Diaoyu sejak Dinasti Ming (1368-1644) dipetakan sebagai pos

navigasi. Arsip Cina menunjukkan Cina sejak awal Dinasti Song Selatan (1127-1279), pulau-pulau digunakan sebagai jalur pengiriman barang (Suganuma, 2000: 42-44).

Alasan emosional utama adalah terkait sengketa kepulauan Diaoyu, sengketa yang terjadi menyajikan ilustrasi dari "kebanggaan / penghinaan". Menurut narasi Beijing, kelompok Kepulauan Diaoyu (sebagai bagian dari Taiwan) diambil dari Cina setelah kekalahan Cina dalam perang Pertama Sino-Jepang yang diprakarsai oleh Jepang pada tahun (1894-1895). Cina berpendapat bahwa kepulauan Diaoyu adalah milik "Provinsi Taiwan", yang menjadi bagian integral dari wilayah Cina. Fakta bahwa baik Cina maupun Taiwan saat ini tidak mengelola Diaoyu, membuat banyak masyarakat Cina memandang terjadi ketidakadilan karena Cina kehilangan kepemilikan sah dari bagian penting wilayahnya (Taira, 2004).

Kepulauan Diaoyu telah tampil sebagai simbol kuat dari bangsa Cina yang menjadi korban di tangan agresi Jepang, dan penderitaan besar yang telah dialami bangsa Cina. Oleh karena itu, penolakan terus menerus Jepang pada klaim Cina dan pembatasan akses Cina ke Diaoyu membawa kemarahan anti-Jepang oleh gerakan nasionalis (Guo, 2012). Di sisi lain, sebagai status internasional Cina mulai naik, dan masyarakat Cina kini merasa bangga dan menganggap bangsa mereka cukup kuat untuk menuntut untuk kembali wilayah yang dirasa sebagai miliknya yang sah. Pada dasarnya, sengketa yang ada saling menghubungkan kebanggaan dan penghinaan yang dirasakan Cina pada masa-masa sebelumnya dan mudah bertukar tempat sesuai situasi "(Callahan, 2010).

Perkembangan dan Pengaruh Nasionalisme Cina

Sejalan dengan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai salah satu yang melatarbelakangi sikap Cina yaitu kekuatan nasionalisme, Rory Medcalf dari *Lowy Institute for International Policy* Australia, mengatakan nasionalisme telah ada untuk waktu yang lama di Cina dan di pupuk oleh partai komunis hingga semakin sulit untuk mengontrolnya saat ini, sebagian karena media sosial. Kepulauan sengketa ini telah menjadi fokus seperti kebanggaan nasional di Cina dan Jepang, di sisi lain kedua pemerintah juga merasa terdorong untuk bereaksi terhadap provokasi yang dirasakan oleh kaum nasionalis. Bonnie Glaser, seorang pakar studi Cina di *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) Washington menegaskan bahwa banyak nasionalis Cina telah dibawa ke dunia Internet untuk mengekspresikan kemarahan terhadap Jepang dan mengkritisi pemerintah karena tidak

berbuat lebih banyak untuk mempertahankan kedaulatan Cina (Lipin, www.voa.news.com 2012).

Jadi, apa pengaruh yang dimiliki nasionalisme terhadap kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari Cina?. Nasionalisme adalah materialisasi dari satu sektor pendapat publik. Sejalan dengan berkembangnya ekonomi dan masyarakat Cina, pemerintah Cina akan merasa semakin sulit untuk mengabaikan pendapat publik. nasionalisme yang semakin berkembang dengan adanya internet lebih mampu memobilisasi dan membangkitkan sentimen publik. Beberapa pemimpin Cina bahkan secara pribadi berpartisipasi dalam diskusi internet dengan elemen masyarakat Cina karena telah menjadi sangat sulit bagi mereka untuk mengabaikan suara-suara para nasionalis populer (Fook dan Yi, 2009). Dalam konteks politik Cina, jika pemerintah memberikan perhatian dan membahas masalah ini dengan serius, nasionalisme mungkin menjadi kekuatan yang berkontribusi terhadap stabilitas sosial. Namun, jika kepemimpinan mengabaikan suara-suara yang ada, legitimasi mereka untuk memimpin akan dipertanyakan (Ferguson, <http://mag.newsweek.com> 2012).

(a) Perkembangan Nasionalisme Populer di Cina Pasca 1990-an

Memasuki era 1990-an, publik Cina memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi lebih dari dunia luar berkat perkembangan teknologi internet di Cina. Hal ini memberi tantangan baru pada kepemimpinan Partai Komunis Cina (PKC) dan juga menandai mulai terjadinya transformasi nasionalisme di Cina. Beberapa penulis yang mencermati nasionalisme Cina memandang naiknya nasionalisme merupakan hasil dari perubahan pemetaan politik dunia setelah Perang Dingin dan pengaruh kampanye edukasi patriotik oleh pemerintahan PKC pada awal 1990-an (Gries, 2004; Zhao; 2004a; and Hughes, 2006).

Selama masa kepemimpinan nasionalisme oleh pihak PKC, kampanye edukasi patriotik tidak hanya membangkitkan ingatan masyarakat Cina tentang masa-masa jaya dulu namun juga memberikan doktrin yang kuat mengenai “national humiliation education” yang mengingatkan kekalahan Cina (Callahan 2010:14). Menurut Callahan, alasan bagi PKC mempromosikan gambaran negatif sebagai korban adalah sebagai sarana membantu KCP menekan perasaan terkait “penebusan” dan meningkatkan sisi positif nasionalisme populer yang merupakan kebanggaan bangsa Cina. Hal yang menarik adalah perasaan bangga

muncul melampaui perasaan terhina, dan perasaan terhina merupakan akibat perasaan bangga. Ketika masyarakat Cina mencapai suatu prestasi di dunia internasional maka kebanggaan ini menguat. Sebaliknya kebanggaan yang menguat menjadi bumerang ketika Cina di diskreditkan oleh negara lain. Nasionalis populer di Cina memiliki 'batas yang rendah terhadap kritik asing dan tanpa toleransi untuk kehilangan muka di wajah dunia' (Shambaugh, 2008)

(b) Tekanan Nasionalis dan Gerakan “Mempertahankan” Kepulauan Diaoyu

Isu tentang perebutan kepulauan Diaoyu merupakan isu yang sensitif bagi masyarakat Cina. Nasionalis anti-Jepang selalu merasa teusik dan menimbulkan sentimental kuat setiap pemberitaan atau terjadi suatu peristiwa yang berhubungan dengan sengketa muncul dalam pemberitaan. Bagi sebagian orang, ekspresi kemarahan terhadap Jepang di lakukan hanya sebatas di dunia maya. Sementara di Cina terdapat tiga organisasi utama non-pemerintah (NGO) di Great Cina (RRC, Hong Kong dan Taiwan) yang bertujuan untuk aktif dalam melakukan aksi pembelaan terhadap kedaulatan Kepulauan Diaoyu. NGO ini memimpin jalannya kolaborasi kegiatan kolektif melawan pendudukan Jepang atas Diaoyu, dari mengorganisir aksi protes di jalan serta pendanaan untuk aktivis yang berlayar ke pulau Diaoyutai.. Ketiga NGO ini juga saling menjalin komunikasi guna mengorganisir gerakan-gerakan bersama dalam mempertahankan kedaulatan Diaoyu. (Guo, 2012:172-173).

Protes yang dilakukan di jalanan dan aktivis yang berlayar ke kepulauan Diaoyu sering terjadi dalam menanggapi perlakuan yang dilakukan Jepang terhadap kapal nelayan Cina di wilayah yang disengketakan. Aksi yang dilakukan oleh para aktivis NGO ini seringkali dirasakan kurang baik oleh pihak pemerintah Cina. Kekhawatiran dirasakan atas aksi yang dilakukan dapat memberi dampak negatif pada jalur resmi diplomasi dan stabilitas sosial. Secara resmi, baik Cina maupun Taiwan belum pernah berusaha melakukan pendaratan di Kepulauan Diaoyu atau bentuk lain dari deklarasi fisik, karena keduanya lebih memilih untuk menangani sengketa dengan Jepang melalui saluran diplomatik. (Guo, 2012:172-174).

Kemudian, nasionalisasi yang dilakukan Jepang telah berakibat pecahnya aksi protes besar-besaran oleh nasionalis Cina. Nasionalisasi Jepang mengakibatkan gelombang aksi anti-Jepang. Pada 15 september 2012, aksi protes di jalan berlangsung di sejumlah kota di seluruh Cina yang merupakan insiden anti-Jepang terbesar sejak normalisasi hubungan diplomatik Cina-Jepang pada tahun 1972. Kedutaan Jepang di Beijing dikepung oleh ribuan pengunjuk rasa kemudian pada hari

berikutnya gerakan protes terjadi di berbagai kota utama dan berubah menjadi aksi kekerasan ditandai bentrok massa yang menyebabkan beberapa perusahaan besar Jepang (anonim, www.scmp.com 2013)

Guo melihat bahwa terdapat dua bentuk tekanan domestik yang cukup besar pada pemerintah Cina oleh nasionalis. Jenis pertama dari tekanan domestik dari nasionalis adalah apa yang di sebut Guo sebagai kritik "weak knee". Hal ini muncul ketika pemerintah dikritik oleh nasionalis karena terlalu lemah dalam bertindak menghadapi agresor asing yang mana dalam kasus sengketa kepulauan Diaoyu adalah dengan Jepang (Guo, 2012). Tekanan yang ke dua adalah sindrom "inward outcry", dikatakan oleh Guo, sindrom ini bekerja ketika terjadi ketidakpuasan pada isu-isu domestik termasuk di dalamnya terdapat kritik yang diarahkan pada kebijakan luar negeri PKC. Dengan kata lain, kekecewaan dalam kebijakan luar negeri pemerintah digunakan sebagai kesempatan untuk menyuarakan ketidaksetujuan dalam politik domestik. Di sini, kritik terhadap pemerintah pada kebijakan luar negeri beralih menjadi kritik terhadap penanganan pemerintah dalam isu domestik.

Perkembangan Ekonomi dan Militer Cina

Kapabilitas yang dimiliki Cina merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi tentang bagaimana mereka akan bersikap terhadap isu-isu domestik maupun internasional. Dengan pertimbangan apa yang dilakukan Cina saat ini, mereka sedang membangun kekuatan militer yang memiliki kemampuan proyeksi kekuatan yang signifikan, dan seperti *Defence White Paper* sebutkan, modernisasi militer Cina akan semakin ditandai dengan pengembangan kemampuan proyeksi kekuatan (Department of Defence, Australian Government). Tentu saja, sebagian besar pemimpin Cina berpikir bahwa angkatan laut mereka berorientasi membela diri. Namun,. Robert Kaplan (2010) menyatakan tampaknya hampir pasti bahwa sebagai angkatan laut, Cina tumbuh dalam ukuran dan kemampuan yang kuat hingga tidak ada satupun negara tetangga yang akan memandangnya berorientasi defensif. Mereka malah akan melihatnya sebagai kekuatan ofensif tangguh.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi Cina telah menyebabkan banyak analisis berspekulasi apakah Cina akan menjadi "kekuatan ekonomi terbesar dunia.". Tolak ukur kekuatan ekonomi Cina telah menjadi subyek perdebatan luas di kalangan ekonom. Berdasarkan data IMF diukur

dalam dolar AS dengan menggunakan kurs nominal, PDB Cina pada tahun 2013 adalah \$ 95 trilyun, sekitar 56% dibandingkan ukuran kekuatan ekonomi AS. Sedangkan PDB per kapita (pengukuran umum dari standar hidup negara) dari Cina \$ 6959, yaitu berkisar 13% dibandingkan ukuran tingkat AS.

Cina dapat dikatakan telah mengadopsi reformasi pasar bebas pada tahun 1979, setelah kebijakan Cina mulai lebih terbuka dengan perdagangan luar negeri serta adanya investasi. Saat ini Cina telah menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat, dengan produk domestik bruto tahunan (PDB) rata-rata pertumbuhan hampir 10% sampai 2013. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina telah muncul sebagai ekonomi global utama dan aktor kuat dalam perdagangan. Saat ini Cina telah menjadi aktor perdagangan barang terbesar dunia, menjadi tujuan investasi asing langsung (FDI) terbesar kedua, produsen manufaktur terbesar, pemegang cadangan devisa terbesar, dan diproyeksikan untuk menjadi ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2014.

Militer Cina telah mengalami pengembangan baik dalam investasi yang signifikan dan modernisasi selama dua dekade terakhir, yang berimbas pada kekuatan militer yang semakin canggih dan berteknologi. Bersama-sama, People's Liberation Army (PLA), People's Liberation Army Navy (PLAN) dan the People's Liberation Army Air Force (PLAAF) merupakan militer terbesar di dunia, dengan 2,3 juta personel aktif dan lebih 500.000 unit cadangan. Modernisasi angkatan bersenjata Cina telah didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat selama seperempat abad terakhir, dengan belanja militer meningkat setiap tahun sejak tahun 1994. Pada tahun 2014 Cina mengumumkan kenaikan 12,2% dalam pengeluaran militer sebesar \$ 131,57 miliar dolar AS (Anonim, www.lowyinstitute.org 2014).

Terjadi perubahan yang penting dalam kemampuan militer relatif Cina di kawasan daratan Asia. Setelah Uni Soviet mundur dari IndoCina dimulai pada akhir 1980-an, Cina muncul sebagai kekuatan besar di wilayah itu. Kemudian sebagai reformasi, Cina telah mengembangkan ekonomi dan militer, keunggulan Cina atas tetangganya telah melebar.(Stephen, 1998). Sejak awal 1990-an, militer Cina lebih berfokus pada investasi dalam berbagai teknologi baru dan kemampuan tempur, yaitu platform 'anti-access/area denial' (A2 / AD) dan baru-baru ini juga mulai dalam kapasitas proyeksi kekuatan. Secara khusus, PLA serta PLAN dan PLAAF telah berinvestasi untuk senjata canggih yang baru dan sistem diarahkan mencegah gerakan pasukan musuh ke dalam area tempur (Anonim, www.lowyinstitute.org 2014). Sebagai contoh, kemajuan dalam serangan rudal balistik jarak pendek dan jarak menengah, rudal balistik anti-kapal serta udara telah

meningkatkan kemampuan militer Cina menangkal kekuatan proyeksi yang mendekat memasuki perairan pesisir Cina. Platform baru seperti diesel Type 041 kapal selam dan kapal tempur baru seperti Type 052 meningkatkan strategi ini. Baru-baru ini, investasi juga dilakukan Cina terhadap kapal induk pertama, Liaoning, dan pengujian pesawat tempur siluman baru, J-20, memiliki kemampuan baru dalam proyeksi kekuatan dan terus dalam pengembangan.

Pada perkembangannya, Modernisasi militer Cina merupakan bagian integral dari ambisi negara itu untuk memperluas kekuasaan ekonomi dan politik global. Setelah berhasil menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia yang mana diperkirakan akan menjadi yang terbesar pada 2021-Cina melihat pertumbuhan yang berkelanjutan menuntut kemampuannya untuk mengamankan energi dan sumber daya mineral, memperluas perdagangan serta membuka akses ke pasar baru (Nurkin dkk, www.ihs.com 2014).

Dimensi Ekonomi dan Militer dari Great Power

Permasalahan sumber daya energi di perairan laut Cina meski secara legal tidak mengikat Cina namun tampaknya menjadi suatu kebanggaan dan legitimasi bagi Cina. pandangan para politik realis berpendapat kebutuhan Cina akan energi sebagai permasalahan yang perlu di perhatikan. Kebutuhan akan sumber energi dapat menyebabkan Cina mengambil langkah-langkan mulai dari diplomasi resmi hingga ekspansi militer. Robertson berpendapat 'Cina's appetite for energy resources,' lebih berpotensi mengancam dibanding trend menjadi great power (Jeffrey, www.atimes.com 2004)

Implikasi dari kebutuhan energi Cina menimbulkan pertanyaan apakah Cina akan memenuhi apa yang di inginkannya dengan pilihan soft power atau hard - atau kombinasi keduanya apa? Sebuah sumber klasik budaya strategis Cina, Sun Tzu menyatakan bahwa 'All warfare is deception'. (Sun Tzu dalam Griffith, 1963) dengan konsep strategi ini maka akan timbul beberapa pertanyaan seperti: seberapa menipunya kapasitas kekuatan militer Cina; seberapa lembut hard power Cina; seberapa keras adalah soft power Cina. Kombinasi ini berbicara dengan seorang realis budaya strategis yang melihat beberapa komentator sebagai hasil alami dari kebangkitan Cina untuk kekuatan global. pada November 2004 IISS menyatakan Cina telah berusaha untuk mempromosikan berbagai pengaturan kelembagaan baru yang mengecualikan Amerika

Serikat. di Asia Timur di mana Cina dapat menjalankan peran kepemimpinan secara alami. Untuk kebutuhan untuk energi, Cina telah memperluas diplomasi sumber daya energi untuk Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika. (IISS, 2004)

Menjadi suatu hal yang penting untuk memahami bahwa perkembangan ekonomi dan militer Cina memiliki pengaruh akan kebutuhan sumberdaya energi. Hal ini juga akan berhubungan dengan bagaimana Cina mengambil sikap atas peningkatan kapabilitas power yang dimilikinya menanggapi persaingan di ranah regional maupun global untuk menempatkan posisi status sebagai negara kuat. Selain itu pandangan Cina akan sejarah masa lalu juga turut mengambil peran tentang keinginan mencapai kejayaan kembali.

**Bagaimana Nasionalisme dan Kapabilitas Power
Menpengaruhi Sikap Cina
(a) Pengaruh Nasionalisme Terhadap Sikap Cina**

Dimulai pada masa pembebasan Cina atas pendudukan asing, PKC telah berusaha membentuk nasionalisme Cina untuk mempertahankan legitimasi kepemimpinannya. Retorika pemerintahan Cina tentang penghinaan pada masa pendudukan dan kebanggaan kejayaan masa lalu menjadi sarana untuk merubah pandangan masyarakat Cina tentang identitas bangsa. Dimana masyarakat Cina merasa mereka harus bangkit mempertahankan kebebasan yang dimiliki dan mengembalikan kondisi negara seperti pada masa kejayaan. Faktor sejarah sebagai unsur penting bagi nasionalisme menjadikan para nasionalis Cina lebih sensitif terhadap pihak Jepang.. Nasionalis Cina berkaitan dengan permasalahan sengketa sering mengekspresikan kemarahan mereka dengan aksi turun ke jalan bahkan hingga berlayar ke kepulauan Diaoyu.

Kemudian bagaimana nasionalisme berdampak pada sikap Cina. Retorika yang dilakukan oleh pemerintah Cina kemudian menjadi bumerang terhadap pemerintahan Cina sendiri ketika perkembangan teknologi membawa internet masuk ke Cina. dengan adanya media internet, kaum nasionalis populer menjadi lebih mudah mendapatkan informasi dan saling berkomunikasi serta menyuarakan pemikiran mereka. Tekanan-tekanan yang dilakukan nasionalis populer terhadap pemerintahan Cina telah banyak mempengaruhi tindakan-tindakan yang di ambil Cina berkaitan dengan sikap dan kebijakan luar negeri. Pemerintah tentu tidak mau dianggap lemah dalam memimpin Cina sementara mereka selalu menyuarakan kebangkitan Cina. Tekanan semakin lebih perlu di perhatikan karena ternyata kritik terhadap pemerintah tidak sebatas permasalahan luar negri namun juga sering berlanjut pada kritik terhadap politik domestik.

(b) Pengaruh Kapabilitas Power Terhadap Sikap Cina

Perkembangan ekonomi dan militer Cina yang signifikan pada beberapa dekade terakhir membawa Cina muncul sebagai salah satu negara kuat baik di regional maupun dunia. Walaupun Cina telah pandang sebagai negara kuat namun bukan berarti Cina dapat begitu saja menekan pihak asing dalam hal ini adalah Jepang. Meski begitu, dengan peningkatan kapabilitas power yang dimiliki membuat Cina lebih percaya diri untuk semakin memperluas hagemoninya. Cina juga telah meningkatkan investasi militer untuk memperkuat pertahanan militernya. Peningkatan militer Cina tentu akan menjadi perhatian bagi negara sekitarnya yang merasa terancam. Hal ini disebabkan negara tidak pernah bisa yakin tentang tujuan masing-masing. Mereka tidak bisa tahu dengan tingkat kepastian yang tinggi apakah mereka berhadapan dengan negara revisionis atau status quo. Bahkan jika ada yang bisa memastikan tujuan suatu negara saat ini, tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi di masa mendatang. Hal itu karena mustahil mengidentifikasi siapa yang menjalankan kebijakan luar negeri suatu negara 5 atau 10 tahun kedepan dan apakah mereka akan bersikap agresif (Copeland, 2000; Leviathan, 1985; Mearsheimer, 2001).

Seperti dikatakan diatas bahwa ekonomi Cina saat ini telah melampaui Jepang, dengan begitu dari segi ini Cina akan memiliki nilai tawar lebih dalam bersikap terhadap Jepang. Jika menggunakan kekuatan militer bukanlah pilihan pertama maka Cina dapat menggunakan ekonomi sebagai alat untuk menekan Jepang. Mengingat banyak investasi serta pabrik-pabrik besar milik Jepang di Cina. Apalagi Cina dan Jepang memiliki salah satu hubungan perdagangan terbesar dunia, senilai \$340 miliar Dollar. Bagi Jepang, Cina merupakan mitra dagang dan pasar ekspor terbesar. Terlebih lagi Cina juga menjadi salah satu negara pemegang finansial terbesar terhadap hutang publik Jepang, memegang sekitar ¥18 miliar Yen atau \$230 miliar Dollar, menyusul lonjakan besar 70% sejak 2010. Gangguan ekonomi mungkin akan berimbas juga terhadap Cina, namun Jepang tentu akan lebih preventif terkait isu perekonomian setelah mulai menurunnya perkembangan ekonomi Jepang pada tahun-tahun terakhir ini.

Kesimpulan

Kepulauan Diaoyu bagi Cina memiliki arti yang penting karena adanya kekayaan sumberdaya alam berupa minyak bumi dan gas alam, posisi geografi yang strategis dan nilai sejarah yang sentimentil. Kebutuhan

akan pasokan energi menjadikan penting bagi Cina untuk memperoleh cadangan sumberdaya baru guna menyokong kelangsungan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Secara strategis juga posisi kepulauan Diaoyu dapat memperkuat pertahanan militer Jepang. Dua hal ini ternyata juga berkorelasi dengan faktor kapabilitas power yang mana meningkatnya ekonomi dan militer Cina memerlukan manajemen berkelanjutan agar Cina mampu menjadi negara dominan di ranah internasional. Status power yang dimiliki saat ini telah meningkatkan kepercayaan diri Cina dalam berbagai aspek.

Nilai sejarah dan emosional yang ada pada Cina menunjukkan peran yang sangat berkesinambungan. Sikap agresif yang ditunjukkan Cina bukan hanya karena adanya sumberdaya alam yang ingin segera dikuasai ataupun karena ingin segera memperkuat posisinya di wilayah regional, namun lebih kompleks lagi karena adanya ikatan emosional dan tekanan publik terkait nasionalisme. Nasionalisme yang ada di Cina saat ini sangat dipengaruhi oleh sejarah kemunduran Cina dan rasa penghinaan atas pendudukan Jepang pada era perang Sino-Jepang. Dengan demikian permasalahan dengan Jepang menjadi lebih sensitif karena adanya rasa persaingan dan sakit hati. Selain itu, tekanan yang di tujukan pada pemerintah oleh para nasionalis populer tidak dapat begitu saja diabaikan dikarenakan pemerintah ingin tetap menjaga legitimasi kepemimpinan.

Daftar Pustaka

Buku

Barme, Geremie R. (1995) 'To Screw Foreigners is Patriotic: China's

Avant---Garde Nationalist,' *The China Journal*. 34, 209---234.

Callahan, William A.(2010) *China:The Pessoptimist Nation*. Oxford: Oxford University Press.

Chen,Zhimin (2005)'Nationalism, Internationalism and Chinese Foreign

Policy,'*Journal of Contemporary China*. 14(42),35---53

Christensen, Thomas. (1999) "Chinese Realpolitik: Reading Beijing's World View". *Foreign Affairs*. Vol. 75.

*Pengaruh Nasionalisme dan Perkembangan Kapabilitas Power Cina Pada
Sikap Agresif Terhadap Jepang Pasca Nasionalisasi Jepang atas
Senkaku/Diaoyu Tahun 2012*

- Copeland ,Dale C. (2000) *The Origins of Major War*. Ithaca: Cornell University Press.
- Department of Defence, Australian Government, *Defending Australia in the Asia Pacific Century*,
- Duara,Prasnjit(1996)'Deconstructing the Chinese Nation,'in Jonathan Unger(ed.),*Chinese Nationalism*. Armonk, NY: M.E.Sharpe.
- Ferguson, Niall. (2012) "The technocrat candidate". *Newsweek magazine* 23 January 2012.
- Johnston, Iain. (2007) *Social States: China in International Relations 1980-2000*. Princeton University Press.
- Gellner, E. (1983), *Nations and Nationalism*, Oxford: Blackwell.
- Gilpin, Robert. (1981), *War and Change in world politics*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Gries, Peter Hays. (2005) *China's New Nationalism: Pride, Politics, and Diplomacy*. University of California Press.
- Hughes, Christopher R. (2000) 'Nationalism in Chinese Cyberspace,'

Cambridge Review of International Affairs. 13 (2), 195---209.

- Kaplan, Robert D. (2010), 'The Geography of Chinese Power', *Foreign Affairs*, Vol. 89, No. 3
- Kugler, J. Ronald Tamen. (2004) *Regional Challenge: China's Rise to Power*, in: *The Asia-Pacific: A Region in Transition*, ed. J. Rolfe, Asia-Pacific Centre for Security Studies, Honolulu
- Liu, Shih-Diing. (2010) "Networking Anti-Japanese Protests: Popular Sovereignty Reasserted since 2005" *From Online Chinese nationalism and China's bilateral relations*. Eds Simon Shen and Shaun Breslin. Lexington Books.
- Mearsheimer, John J. (2001) *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: Norton
- Ministry of Foreign Affairs Japan 2013, *Japan-China relations: current situation of Senkaku Islands*, Ministry of Foreign Affairs of Japan, Tokyo.
- Moleong, L. Y. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi . Bandung: PT Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Perwita, Anak Agung Banyu and Yanyan Mochamad Yani. (2005) *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Plano, Jack C. and Roy Olton. (1999) *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin.

- Qian, Yingyi. 1999. "The Institutional Foundations of China's Market Transition." Paper presented at the World Bank's Annual Conference on Development Economics, Washington, DC.
- Robin Wright(2004), 'Iran's New Alliance with China could Undermine U.S. Leverage', *The Wall Street Journal Europe*, , p. A3.
- Ronald L. Tammen et al. (2000) *Power Transitions: Strategies for the 21st Century*. New York: Seven Bridges Press.
- Suganuma(2000), *Sovereign Rights and Territorial Space*,.
- Scarborough,Rowan (2006)'Admiral Says Sub Risked A Shootout,' *The Washington Times*. 15 November,
- Shaw, Han-yi. (1999) *The Diaoyutai/Senkaku Islands dispute: its history and an analysis of the ownership claims of the P.R.C., R.O.C., and Japan*, Baltimore, University of Maryland School of Law.
- Silalahi, Ulber. (2006) *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar
- Smith, A.D. (2001), *Nationalism*, Cambridge: Polity Press
- Stephen J. Blank(1998), 'Who's Minding the Store?: The Failure of Russian Security Policy,' *Problems of Post-Communism*, Vol. 45, No. 2 pp. 3-11.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. (2004) *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Taira, Koji (2004) 'The China---Japan Clash over the Diaoyu/Senkaku Islands,' *The Asia--Pacific Journal*.18,23 September.
- Viotti, Paul R. and Mark V. Kauppi. (1999) *International Relation Theory*. Needham Heights: A Viacom Company.
- Wendt, Alexander. (1995) "Constructing International Politics." *International Security* 20(1), pp. 71-81.
- Whiting, Allen S. (1983) 'Assertive Nationalism in Chinese Foreign Policy,' *Asian Survey*. 23 (8), 913---933.
- Xu, Chenggang. 2011. "The Fundamental Institutions of China's Reforms and Development." *Journal of Economic Literature* 49(4): 1076 -1151.
- Yahuda, Michael (1997) 'How Much Has China Learned about Interdependence?,' in David S.G.Goodman and Gerald Segal (eds),

*Pengaruh Nasionalisme dan Perkembangan Kapabilitas Power Cina Pada
Sikap Agresif Terhadap Jepang Pasca Nasionalisasi Jepang atas
Senkaku/Diaoyu Tahun 2012*

China Rising: Nationalism and Interdependence. London:

Routledge, 6---26.

Yee, A 2011, 'Maritime territorial disputes in East Asia: a comparative analysis of the South China Sea and the East China Sea', *Journal of Current Chinese Affairs*, no.2, pp.165-195

_____. (1999) *Social Theory of International Politics*, UK: Cambridge University Press.

Young, Alwyn. 2003. "Gold into Base Metals: Productivity Growth in the People's Republic of China during the Reform Period." *Journal of Political Economy* 111(1): 1220-61.

Zhao, Suisheng (2000) 'Chinese Nationalism and Its International

Orientations,' *Political Science Quarterly*. 115 (1), 1---33.

Zheng, Yongnian (1999) *Discover Nationalism in China: Modernization, Identity and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.

Zhu, Xiaodong. 2012. "Understanding China's Growth: Past, Present, and Future." *Journal of Economic Perspectives*, 26(4): 103-24.

Situs internet:

Anonim. (2013), How a remote rock split China and Japan. [Diakses pada 17 september 2013 pukul 22:10]
<http://edition.cnn.com/2012/09/17/world/asia/china-japan-islands-dispute-explained/index.html>

_____. (2012), Timeline: the Diaoyu-Senkaku Islands dispute. [Diakses pada 14 september 2013 pukul 20:50]
<http://www.scmp.com/news/china/article/1039204/timeline-diaoyu-senkaku-islands-dispute>

_____. (2013), Q&A: China-Japan islands row. [Diakses pada 14 september 2013 pukul 20:44]
<http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11341139>

_____. (2013) Japans Defense Minister Says China Endangering Peace in the Region [diakses pada 6 november 2013 pukul 18:00 WIB]
<http://japandailynews.com/japans-defense-minister-says-china-endangering-peace-in-the-region-2938673/>

- _____, Unresolved territorial and maritime claims continue to hinder exploration and development in the East China Sea. <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=ecs> 2014
- _____, Chinese Military <http://www.lowyinstitute.org/issues/chinese-military> 2014
- Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2013 http://www.defense.gov/pubs/2014_dod_china_report.pdf
- Huang, C 2012, 'Diaoyu Islands dispute about resources not land', South Mornington, [Diakses pada 1 September 2014 pukul 20:55 WIB] <http://www.scmp.com/news/china/article/1096774/diaoyu-islands-dispute-about-resources-not-land>
- Kalha , R.S. (2012), Japan-China stand-off over Senkaku/Diaoyu Islands. [Diakses pada 24 September 2014 pukul 20:34 WIB] http://www.idsa.in/idsacomment/JapanChinaStandoffOverSenkakuDiaoyuIslands_rskalha_270812
- kyle mizokami Why the Chinese military is only a paper dragon <http://theweek.com/article/index/264774/why-the-chinese-military-is-only-a-paper-dragon>
- Lupin, Michael (2012), Nationalism Fuels Japan-China Island Dispute [diakses pada 17 oktober pukul 08:30 WIB] <http://www.voanews.com/content/japan-china-island-dispute-rooted-in-domestic-challenges-nationalist-grievances/1493779.html>
- Mearsheimer, John J. (2010). Chinese Journal of International Politics. 3 (4): pp 381-396. [diakses pada 15 januari 2014 pukul 20:00] <http://cjp.oxfordjournals.org/content/3/4/381.full#>
- Miscevic, Nenad. (2010), "Nationalism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy [diakses pada 17 oktober 2014 pukul 08:00 WIB] <http://plato.stanford.edu/archives/sum2010/entries/nationalism/>
- Philips, Tom. (2012), China deploys two warships after Tokyo announces disputed island purchase. [Diakses pada 17 September 2014 pukul 23:54 Reynold, Isabel. (2013), Japan-China Defense Officials to Meet Amid Island Tensions. [Diakses pada 18 september 2014 pukul 18:30] <http://www.bloomberg.com/news/2013-04-26/japan-china-defense-officials-to-meet-as-island-tensions-flare.html>
- Tate Nurkin, Paul Burton, Tom Skomba and James Hardy The global implications of China's military modernization <https://www.ihs.com/articles/features/chinas-military-modernization.htm>
- Xi Jinping. (2009) "Chinese VP blasts meddling foreigners" [diakses pada 17 oktober 2014 pukul 08:00 WIB] <http://news.asiaone.com/News/the%2BStraits%2BTimes/Story/A1Story20090214-121872.html>.

*Pengaruh Nasionalisme dan Perkembangan Kapabilitas Power Cina Pada
Sikap Agresif Terhadap Jepang Pasca Nasionalisasi Jepang atas
Senkaku/Diaoyu Tahun 2012*

Xia, Ming "China Threat" or a "Peaceful Rise of China"? [diakses pada 6
november 2013 pukul 20:00 WIB]
<http://www.nytimes.com/ref/college/coll-china-politics-007.html>